



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

2025

.....

LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Laporan Kinerja SKPD Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. dan didasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan alat penilai kinerja OPD secara kuantitatif, dan wujud transparansi serta akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara menuju *good governance*.

Demikian Laporan Kinerja (LK) ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LK dan pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 diucapkan terimakasih.

Air Putih, 28 Februari 2026

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Batu Bara**

Ir. Susilistiawati Ritonga, M.Si
NIP. 19680228 199303 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	4
2.1 RENCANA KERJA.....	4
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	39
BAB IV PENUTUP.....	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Target Indikator Kinerja Utama.....	5
Tabel 2.1.2	Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Indikator Kinerja.....	6
Tabel 2.2.1	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	11
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	13
Tabel 3.1.2	Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025.....	24
Tabel 3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 s.d 2025.....	33
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029.....	35
Tabel 3.1.5	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	36
Tabel 3.2.1	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	38
Tabel 3.3.1	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian berperan secara strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sumber pendapatan masyarakat petani dan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sendiri masih merupakan salah satu instrument pengukuran kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Batu Bara dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pertanian, subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk terlaksananya pembangunan pertanian sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabel dan transparansi sebagai pilar *Good Governance*. Program-program pembangunan pertanian juga memperhatikan isu-isu strategis pertanian saat ini diantaranya; isu pewujudan ketahanan pangan, masih kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian dan penyebarannya belum merata, daya saing produk pertanian yang masih rendah, laju konversi alih fungsi lahan pertanian yang cenderung meningkat dan belum optimalnya pemasaran produk pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan program-program pembangunan tahun 2025, sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan target kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian

dan Perkebunan serta Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Batu Bara melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

terdiri : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan

4. Bidang Hortikultura, Prasarana dan Sarana

5. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

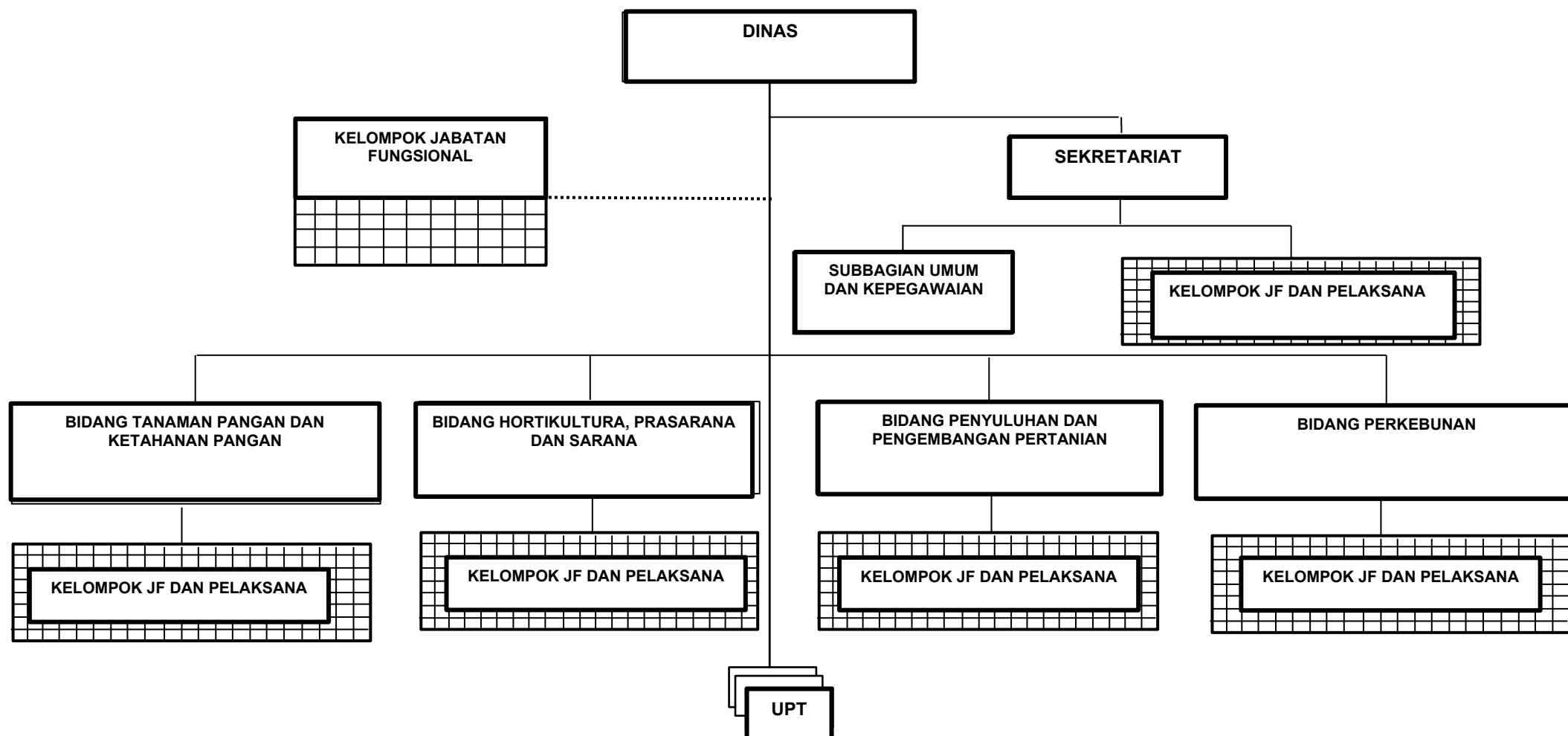
6. Bidang Perkebunan

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada gambar berikut :

Bagan 1.2.1 Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja disusun sebagai pedoman dalam menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026, sedangkan Perubahan Renja dan Perubahan Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 telah ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Meningkatnya Ketahanan Pangan

dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
- b. Meningkatnya Kualitas Pangan
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Batu Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA
1	Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB	PDRB Sektor Pertanian (Subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) / PDRB Kab. Batu Bara x 100%
		Jumlah Produksi Padi	Jumlah produksi padi
		Jumlah Produksi Cabai Merah	Jumlah produksi cabai merah
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Jumlah produksi kelapa
		Jumlah Produksi Kelapa	Jumlah produksi kelapa
2	Meningkatnya kualitas pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks Ketahanan Pangan yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian++ skor PPH kelompok lain
3	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP dari Inspektorat Daerah

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Indikator Kinerja

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target	
			Kinerja	Rp.
Meningkatnya Kualitas Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian rawan pangan	12 kecamatan	7,616,003
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 laporan	7,616,003
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	7,616,003
Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	75.77 BB	16,020,224,541
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Laporan	12,880,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	3,400,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	9,480,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3 Dokumen	14,614,507,580
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	137 Orang	14,460,915,580
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Laporan	149,492,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	4,100,000

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target	
			Kinerja	Rp.
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	1 Laporan	9,500,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	9,500,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	48,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	80 paket	48,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	4 Laporan	170,201,081
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan keperluan kantor lainnya	12 Paket	40,451,081
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	4 Paket	16,300,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1259 Dokumen	19,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130 Laporan	94,450,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	6 Unit	101,200,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	67,200,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	34,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	787,155,880

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target	
			Kinerja	Rp.
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	2,600,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	146,155,880
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	638,400,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	99 Unit	276,780,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	50,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	74 Unit	161,480,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	12,300,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	50,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit	3,000,000

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target	
			Kinerja	Rp.
Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas lahan baku terfasilitasi sarana pertanian	766 Ha	1,418,282,609
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian	3 Laporan	554,730,704
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	291,948,704
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	232,696,000
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3 ton	30,086,000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	2 Dokumen	863,551,905
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen	432,354,505
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 VUB	431,197,400
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan baku terfasilitasi prasarana pertanian	615 Ha	2,367,309,951
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	2 Dokumen	1,067,309,951

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target	
			Kinerja	Rp.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	314,344,000
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	250 Ha	752,965,951
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	10 Unit	1,300,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	750,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 Unit	550,000,000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang Dibina	1192 Kelompok	1,102,837,100
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kelembagaan pertanian	3 Laporan	1,102,837,100
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	51,726,500
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	122 Orang	919,480,600
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	14 dokumen	131,630,000
Jumlah				20,916,270,204

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, telah ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB	Persen	18,70
		Jumlah Produksi Padi	Ton	140.000,00
		Jumlah Produksi Cabai Merah	Ton	16.700,00
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	190.950,00
		Jumlah Produksi Kelapa	Ton	55.000,00
2	Meningkatnya kualitas pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,45
		Skor Pola Pangan Harapan	Angka (1-100)	82,00
3	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75,77)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.020.224.541	PAPBD
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	7.616.003	PAPBD
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.418.282.609	PAPBD
4	Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.367.309.951	PAPBD
5	Program Penyuluhan Pertanian	1.102.837.100	PAPBD
JUMLAH		20.916.270.204	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB *	Persen	18,70	19,06	101,93
	Jumlah Produksi Padi	Ton	140.000,00	127.999,89	91,43
	Jumlah Produksi Cabai Merah	Ton	16.700,00	15.900,38	95,21
	Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	190.950,00	209.600	109,77
	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	55.000,00	49.800	90,54
Meningkatnya Kualitas Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	78,45	69,31	88,34
	Skor Pola Pangan Harapan	Angka (1-100)	82,00	87,85	107,13
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75,77)	BB (75,77)	100,00

Ket: *) Sumber Data BPS Kabupaten Batu Bara

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya rasio PDRB sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) yaitu:

1. Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB

Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB Tahun 2025 sebesar 19,06% dari target 18,70% atau mencapai 101,93. Pencapaian tersebut secara **internal** paling besar dipengaruhi oleh produksi perkebunan kelapa sawit yang meningkat. Program peremajaan kebun sawit rakyat yang sudah dijalankan sejak tahun 2018 sudah mulai memasuki Masa Menghasilkan (TM), meningkatkan volume perdagangan di tingkat hilir. sehingga hasilnya melimpah. Dari sisi **eksternal** tingginya harga komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dunia pada tahun 2025 turut mendorong peningkatan PDRB Sektor pertanian utamanya pada subsektor perkebunan. Hal ini memicu nilai transaksi bruto pada subsektor perkebunan melonjak tajam, sehingga meningkatkan bobot sektor pertanian secara keseluruhan dalam struktur PDRB daerah.

2. Produksi Padi.

Target produksi padi Tahun 2025 ditetapkan sebesar 140.000 ton, sedangkan realisasi mencapai 127.999,89 ton atau sebesar 91,43% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Produksi padi tersebut diperoleh dari luas panen 22.598,85 Ha dan produktivitas sebesar 56,64 kw/Ha. Produktivitas tersebut lebih tinggi dari pada produktivitas padi sawah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yakni sebesar 50,67 kw/Ha (Berita Resmi Statistik 66/11/12/Th. XXVIII, 3 November 2025, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara).

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target produksi padi, baik faktor internal maupun eksternal. **Faktor eksternal** yang turut mempengaruhi tidak tercapainya target produksi yaitu terjadinya anomali iklim (kemarau basah yang bergeser ke kemarau ekstrem)

sehingga mempengaruhi jadwal tanam (mundurnya jadwal Musim Tanam II). Adanya kerusakan dan sedimentasi tinggi pada irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi menyebabkan kekeringan pada lahan sawah sehingga tidak dapat ditanami di Kecamatan Air Putih selama tahun 2025.

Secara internal belum tercapainya target produksi dipengaruhi adanya peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di wilayah sentra (seperti Kecamatan Medang Deras, Air Putih, dan Lima Puluh Pesisir), penggunaan varietas yang sama secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama yang menurunkan tingkat produktivitas. Varietas yang digunakan sekarang yaitu Inpari 32, Ciherang dan Mekongga kurang tahan akan cuaca panas ekstrim beberapa tahun belakangan.

Dampak dari ketidak tercapaian target kinerja tersebut adalah berkurangnya kontribusi sektor tanaman pangan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pangan di wilayah tertentu. Namun Dinas Pertanian dan Perkebunan juga telah melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan pendampingan petani, optimalisasi pemanfaatan sarana produksi, dan pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara vertikal dan horizontal dalam perbaikan sarana pengairan.

Koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan diupayakan untuk memperoleh varietas padi sawah yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

- a. Meningkatkan intensitas pendampingan dan pengawalan teknologi budidaya kepada petani;
- b. Memperkuat sistem pengendalian OPT secara terpadu;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian melalui peningkatan indeks pertanaman;
- d. Mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pertanian;
- e. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam mitigasi dampak perubahan iklim.

Capaian indikator produksi padi didukung oleh pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Pada

program-program tersebut dilaksanakan kegiatan berupa penyediaan benih unggul, penyediaan pestisida, pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan budidaya, pengendalian OPT serta peningkatan pengetahuan petani melalui kunjungan lapangan oleh PPL.

3. Produksi cabai merah

Target produksi cabai merah Tahun 2025 sebesar 16.700 ton dengan realisasi sebesar 15.900,38 ton atau 95,21% dari target. **Secara eksternal** belum optimalnya capaian target diakibatkan menurunnya produktivitas cabe merah di Kecamatan Lima Puluh Pesisir (sentra cabai merah di Kabupaten Batu Bara) akibat adanya cuaca ekstrim yakni suhu udara yang tinggi yang terjadi di musim tanam pertama Januari-April.

Secara internal tidak tercapainya produksi cabai merah diakibatkan oleh melonjaknya serangan hama dan penyakit yaitu *Thrips* dan kutu buah. Analisis akar permasalahan menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab tidak tercapainya target adalah menurunnya produktivitas lahan akibat serangan hama dan penyakit tanaman yang diperparah oleh kondisi cuaca yang tidak stabil.

Dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya pasokan cabai merah daerah sehingga berpotensi mempengaruhi stabilitas harga komoditas hortikultura. Dinas Pertanian dan Perkebunan telah melakukan upaya perbaikan melalui penguatan pengendalian hama terpadu, pembongkaran total lahan pertanaman melalui kerjasama dengan pihak swasta, penelitian kawasan ekosistem cabai merah bekerjasama dengan IPB, peningkatan pendampingan petani, serta optimalisasi bantuan sarana produksi guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya;

Indikator ini didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian serta Program Penyuluhan Pertanian melalui kegiatan pengembangan kawasan hortikultura, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan kelompok tani. Program-program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan produksi, meskipun belum sepenuhnya mampu mengatasi pengaruh faktor eksternal yang terjadi selama tahun berjalan.

4. Produksi kelapa sawit

Target produksi kelapa sawit Tahun 2025 ditetapkan sebesar 190.950 ton,

sedangkan realisasi mencapai 209.600 ton atau sebesar 109,77% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit berhasil melampaui target kinerja yang direncanakan. **Faktor internal** yang menyebabkan produksi kelapa sawit mengalami peningkatan adalah mulai berproduksinya lahan lahan *replanting* seperti pada lahan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2018 dan meningkatnya bobot tandan buah segar pada tanaman muda menghasilkan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi capaian target produksi kelapa sawit adalah terjadinya stabilitas dan tren kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional. Tingginya harga jual ini menjadi stimulus yang kuat bagi petani swadaya untuk memelihara kebun mereka secara mandiri. Petani menjadi lebih giat memanen tepat waktu dan mampu membeli pupuk non-subsidi berkualitas demi menjaga produktivitas lahan mereka. Faktor eksternal ini kemudian ditindaklanjuti secara internal oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan melaksanakan kegiatan penerbitan STDB bagi lahan pekebun dan Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun. sertifikasi ISPO adalah sertifikasi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dijalankan secara legal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Selain itu faktor eksternal lainnya yang mendukung yaitu curah hujan dan paparan sinar matahari berada dalam porsi yang pas sepanjang tahun bagi tanaman kelapa sawit.

Analisis menunjukkan bahwa peningkatan produksi kelapa sawit tidak hanya dipengaruhi oleh luas areal panen, tetapi juga oleh peningkatan produktivitas per hektare yang dihasilkan oleh tanaman pada masa produktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program pembinaan dan pengembangan perkebunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil produksi.

Dampak positif dari capaian tersebut antara lain meningkatnya kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian daerah, meningkatnya pendapatan pekebun, serta bertambahnya kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Capaian indikator produksi kelapa sawit didukung oleh pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian serta melalui kegiatan pembinaan usaha perkebunan, pengembangan komoditas perkebunan, peningkatan kapasitas pekebun, dan pendampingan teknis budidaya.

Meskipun target telah terlampaui, upaya peningkatan kinerja tetap akan dilakukan melalui:

1. Peningkatan pembinaan teknis dan pendampingan kepada pekebun.
2. Pendampingan dan Penerapan budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Penguatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman secara terpadu.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perkebunan melalui pelatihan dan penyuluhan.
5. Penguatan sistem monitoring produksi dan produktivitas perkebunan.
6. Mendorong peremajaan tanaman kelapa sawit pada areal yang sudah tidak produktif guna menjaga keberlanjutan produksi pada masa mendatang.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan produksi kelapa sawit dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun berikutnya sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Produksi Kelapa

Target produksi kelapa Tahun 2025 ditetapkan sebesar 55.000 ton, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 49.800 ton atau 90,54% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator produksi kelapa belum mencapai target kinerja yang direncanakan. **Faktor internal** yang menyebabkan produksi kelapa belum mencapai target adalah kondisi tanaman yang didominasi oleh tanaman tua yang produktivitasnya menurun sedangkan tanaman muda belum menghasilkan. Selain itu terbatasnya alokasi anggaran untuk program peremajaan (replanting) tanaman tua/rusak, belum optimalnya pembinaan teknologi pengolahan produk turunan untuk meningkatkan nilai ekonomi petani, serta lemahnya sistem proteksi dan gerakan pengendalian hama terpadu pada komoditas kelapa turut menjaadi faktor tidak optimalnya produksi Kelapa di Kabupaten Batu Bara.

Secara eksternal di sekitar wilayah kebun kelapa, banyak terjadi pembukaan lahan baru (*land clearing*) atau peremajaan kebun sawit. Batang-batang sawit tua yang ditebang dan dibiarkan membusuk di tanah menjadi tempat berkembang biak yang paling disukai oleh Hama Kumbang Badak (*Oryctes rhinoceros*).

Analisis akar permasalahan (root cause analysis) menunjukkan bahwa faktor utama penyebab tidak tercapainya target produksi adalah menurunnya produktivitas tanaman akibat dominasi tanaman tua dan rusak yang belum diremajakan secara optimal, disertai pengaruh kondisi iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman pada beberapa wilayah produksi.

Dampak dari belum tercapainya target produksi kelapa antara lain berkurangnya kontribusi subsektor perkebunan terhadap pencapaian target pembangunan daerah, menurunnya potensi pendapatan pekebun kelapa, serta berkurangnya ketersediaan bahan baku bagi usaha pengolahan berbasis kelapa.

Capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian melalui kegiatan pembinaan usaha perkebunan, pendampingan teknis budidaya, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan pengembangan komoditas perkebunan. Namun demikian, kontribusi program yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan.

Sebagai upaya perbaikan pada tahun berikutnya, langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:

1. Mengidentifikasi dan memetakan areal tanaman kelapa tua, rusak, dan tidak produktif sebagai dasar pelaksanaan program peremajaan tanaman.
2. Meningkatkan pendampingan teknis kepada pekebun terkait penerapan budidaya kelapa yang baik dan berkelanjutan.
3. Memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman melalui penerapan pengendalian hama terpadu.
4. Mendorong penggunaan benih unggul dan teknologi budidaya yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mendukung program pengembangan dan peremajaan perkebunan kelapa.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan produksi dan produktivitas kelapa pada wilayah sentra produksi.

Dengan pelaksanaan berbagai upaya tersebut diharapkan produktivitas dan produksi kelapa dapat meningkat sehingga target kinerja pada tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Pangan

Untuk melihat ketercapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pangan di Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan beberapa indikator berikut:

1. Indeks Ketahanan Pangan

Target Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebesar 78,45 dengan realisasi sebesar 69,31 sehingga capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan. Nilai Indeks Ketahanan Pangan tersebut lebih rendah daripada Indeks Ketahanan Pangan rata-rata dari 34 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 70,47.

Hasil analisis menunjukkan bahwa belum tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa komponen penyusun indeks, terutama aspek ketersediaan kelompok pangan tertentu, akses pangan, dan pemanfaatan pangan yang masih memerlukan penguatan. Faktor yang mempengaruhi antara lain produksi pangan strategis yang belum optimal, distribusi pangan yang belum merata pada beberapa wilayah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi akses terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Analisis akar permasalahan menunjukkan bahwa rendahnya capaian indeks lebih banyak dipengaruhi oleh keterkaitan antar sektor yang belum optimal, mengingat ketahanan pangan merupakan indikator yang dipengaruhi oleh berbagai aspek lintas urusan.

Dampak yang ditimbulkan adalah belum optimalnya tingkat ketahanan pangan daerah dan meningkatnya kerentanan pangan pada kelompok masyarakat tertentu.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan;
- b. Memperkuat program peningkatan produksi dan diversifikasi pangan lokal.
- c. Meningkatkan efektivitas distribusi dan cadangan pangan daerah;
- d. Meningkatkan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap komponen penyusun Indeks Ketahanan Pangan.

Pencapaian indikator Indeks Ketahanan Pangan didukung melalui pelaksanaan program peningkatan ketersediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, pengembangan diversifikasi pangan lokal, serta penguatan sistem informasi pangan. Keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator menunjukkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh satu program, tetapi merupakan hasil sinergi berbagai program dan pemangku kepentingan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, perangkat daerah akan:

1. Menyusun pemetaan risiko pencapaian indikator kinerja utama secara lebih terukur.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan produksi padi, cabai merah, dan komponen penyusun Indeks Ketahanan Pangan.
3. Memperkuat pengendalian faktor-faktor yang berpotensi menghambat pencapaian target.
4. Mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja ke dalam perencanaan program dan penganggaran tahun berikutnya.
5. Menetapkan target dan strategi yang lebih realistis berdasarkan tren capaian, potensi wilayah, dan risiko yang dihadapi.

2. Skor Pola Pangan Harapan

Target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 ditetapkan sebesar 82,00, sedangkan realisasi mencapai 87,85 atau sebesar 107,13% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa telah mencapai target yang menunjukkan bahwa keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat telah melampaui target yang direncanakan. Namun demikian, capaian ini belum mampu menyamai Skor PPH Nasional (95,10) karena masih rendahnya diversifikasi pada konsumsi pangan kelompok protein hewani, umbi-umbian dan kacang-kacangan, yang menjadi rencana tindak lanjut perbaikan pada tahun berikutnya.

Keberhasilan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) didorong oleh **faktor internal** berupa optimalisasi program pendampingan P2L yang bersinergi dengan pendanaan APBD/APBN. Faktor Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pendistribusian benih/bibit tanaman sayuran dan buah-buahan kepada kelompok PKK, dan melalui pendanaan APBD Provinsi dan APBN telah dilaksanakan pendampingan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada 53 kelompok, yang berdampak nyata pada peningkatan skor sayuran dan buahan sebesar 3,8 poin dari skor pada Tahun 2024, selain itu capaian tersebut dipengaruhi oleh edukasi gizi dan pola makan yang semakin meningkat dan mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat.

Faktor eksternal yang mendukung adalah meningkatnya kesadaran dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat terhadap gizi seimbang, yang dibuktikan dengan kenaikan skor konsumsi sayur dan buah sebesar 3,8 poin.

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan semakin baiknya komposisi konsumsi pangan masyarakat yang mendekati pola konsumsi ideal sesuai prinsip gizi seimbang. Kondisi tersebut menjadi indikator positif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan daerah.

Capaian Skor Pola Pangan Harapan didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi konsumsi pangan beragam, pengembangan pangan lokal, pemanfaatan pekarangan pangan, serta pembinaan kelompok masyarakat. Program-program tersebut berkontribusi secara langsung terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga target yang ditetapkan dapat terlampaui.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan dilihat melalui indikator berikut:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar BB (75,77) dan realisasi yang dicapai sebesar BB (75,77) atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Perangkat Daerah telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh beberapa **faktor internal**, antara lain meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam penerapan manajemen kinerja, penyusunan dokumen perencanaan yang lebih selaras dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi, serta peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala turut mendukung perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor Eksternal yang turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah aktifnya pendampingan teknis terkait dokumen perencanaan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah, intensifnya asistensi dan reviu berkala oleh Inspektorat Daerah, serta pendampingan teknis terkait instrumen evaluasi dari KemenPANRB dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*) secara berkelanjutan.

Dari sisi pengelolaan kinerja, perangkat daerah telah berupaya memastikan keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja sehingga prinsip akuntabilitas dan orientasi hasil dapat diterapkan secara lebih optimal. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pembina juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas implementasi AKIP.

Capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah, khususnya kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi kinerja, serta penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Program dan kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi hasil (*outcome*).
2. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja.

3. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui penyempurnaan indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi hasil.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP secara tepat waktu dan terukur.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan kualitas implementasi AKIP Perangkat Daerah dapat terus meningkat sehingga mampu mencapai kategori yang lebih tinggi pada tahun mendatang serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara juga dilakukan pada pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dianggarkan, adapun capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persen- tase
Meningkat nya Kualitas Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian rawan pangan	12 kecamatan	12 kecamatan	100,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100,00

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persen- tase
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
Meningkat nya implement asi reformasi birokrasi dan akuntabilit as kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	75.77 (BB)	75.77 (BB)	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/lap oran perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Laporan	14 Laporan	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	137 Orang	137 Orang	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n dan pengujian/verif ikasi keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	100,00

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persen- tase
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausaha n barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Pakaian Dinas	80 Paket	80 Paket	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakankep erluan kantor lainnya	12 Paket	12 Paket	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-und angan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1259 Dokumen	1256 Dokumen	99,76
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	100,00

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persen- tase
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	6 Unit	6 Unit	100,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	3 Laporan	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	99 Unit	99 Unit	100,00

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persen- tase
	Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	74 Unit	74 Unit	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	18 Unit	100,00
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100,00
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	100,00
Meningkatn ya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Sub Sektor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	Luas lahan baku terfasilitasi sarana pertanian	766 Ha	766 Ha	100,00

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persen- tase
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian	3 Laporan	3 Laporan	100,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	4 Laporan	100,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2 Laporan	100,00
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3 Ton	3 Ton	100,00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 VUB	1 VUB	100,00

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persen- tase
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan baku terfasilitasi prasarana pertanian	615 Ha	590 Ha	95,93
	Pengembang an Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembang an Prasarana Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	100,00
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	250 Ha	225 Ha	90,00
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembanguna n Prasarana Pertanian	10 Unit	10 Unit	100,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang Dibina	1192 Kelompok	1192 Kelompok	100,00
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kelembagaan pertanian	3 Laporan	3 Laporan	100,00

Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output)	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persen- tase
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	7 Unit	100,00
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	122 Orang	122 Orang	100,00
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00
Capaian Rata-Rata					99,50

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga terlihat baik, dengan capaian sebesar 99,50%. Namun terdapat subkegiatan yang capaiannya rendah yaitu pada Subkegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian, dengan target kinerja sebesar 250 Ha dan terealisasi 225 Ha (90,00%) yang disebabkan waktu pelaksanaan kegiatan yang terlambat dimulai sehingga pada akhir tahun anggaran target tersebut tidak dapat tercapai.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya yang secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada Tahun				Realisasi pada Tahun				Rasio Capaian Kinerja terhadap Target (%) pada Tahun			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB *)	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB *	Persen	16,00	16,00	16,00	18,70	16,99	17,82	18,69	19,06	106,19	111,38	116,81	101,93
	Jumlah Produksi Padi	Ton	135.000,00	135.000,00	130.000,00	140.000,00	157.472,84	131.573,52	138.476,24	127.999,89	116,65	97,46	106,52	91,43
	Jumlah Produksi Cabai Merah	Ton	16.000,00	16.000,00	14.000,00	16.700,00	16.271,23	14.092,10	16.661,77	15.900,38	101,70	88,08	119,01	95,21
	Jumlah produksi Kelapa Sawit	Ton	200.000,00	200.000,00	175.000,00	190.950,00	172.636,00	172.636,00	190.950,00	209.600,00	86,32	86,32	109,11	109,77
	Jumlah produksi Kelapa	Ton	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	52.131,00	52.050,00	49.200,00	49.800,00	86,89	86,75	89,45	90,55
Meningkatnya Kualitas Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	88,35
	Skor Pola Pangan Harapan	Angka (1-100)	80,00	80,00	82,00	82,00	84,80	87,27	81,10	87,85	106,00	109,09	98,90	107,13
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (72)	BB(70,01)	BB (70,01)	BB (75,77)	B (61,59)	B (69,56)	BB (73,94)	BB (75,77)	85,54	99,36	105,61	100,00

Ket: *) Sumber Data BPS Kabupaten Batu Bara

1. Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak Tahun 2022, hal ini paling besar disebabkan oleh produksi kelapa sawit yang meningkat disertai harga berlaku yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun
2. Produksi padi pada Tahun 2025 belum optimal yang ditunjukkan dengan angka capaian 91,43% terhadap target. Produksi padi tersebut mengalami penurunan sebesar 10.476,35 ton atau sebesar 7,57% dibandingkan Tahun 2024. Produksi padi sejak Tahun 2022 hingga Tahun 2025 mengalami fluktuasi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan sedimentasi pada irigasi primer yang berdampak pada pergeseran musim tanam, berkurangnya luas tanam akibat kekeringan serta meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman. Penurunan produksi juga disebabkan oleh berkurangnya luas baku sawah pada Tahun 2023. Sebagai tindak lanjut dilakukan peningkatan pendampingan teknis, optimalisasi sarana produksi, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendorong peningkatan produksi di tahun berikutnya.
3. Produksi cabai merah menurun sebesar 777,01 ton atau sebesar 4,66% dibandingkan dengan produksi di tahun 2024, dengan faktor penghambat kinerja yang telah diuraikan sebelumnya. Produksi cabai merah mengalami fluktuasi dengan produksi terendah pada Tahun 2023 yang disebabkan tahun tersebut terjadi banjir di daerah sentral pertanaman cabai merah yaitu Kecamatan Lima Puluh Pesisir sehingga banyak terjadi panen sekali bongkar.
4. Produksi kelapa sawit meningkat sebesar 18.650 ton atau 9,77% jika dibandingkan dengan produksi kelapa sawit Tahun 2024. Produksi kelapa sawit mengalami kenaikan sejak Tahun 2022 yang disebabkan mulai berproduksinya lahan lahan *replanting* seperti pada lahan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2021 dan meningkatnya bobot buah pada tanaman muda menghasilkan
5. Produksi kelapa mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan hanya mengalami sedikit kenaikan pada Tahun 2025 yakni sebesar 600 ton atau 1,22% dibandingkan dengan produksi Tahun 2024. Kenaikan produksi kelapa tidak berbanding lurus dengan capaian target yang belum optimal yakni 90,54 dengan faktor seperti pada uraian sebelumnya.
6. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator yang baru ditambahkan pada

Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029.

7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) naik sebesar 6,75 poin atau sebesar 8,32% dari tahun sebelumnya yang menunjukkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat telah melampaui target yang direncanakan. Skor PPH yang mencapai target namun berbanding terbalik dengan IKP yang belum mencapai target menunjukkan bahwa keragaman dan keseimbangan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Batu Bara telah tercapai namun ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan di Kabupaten Batu Bara belum mencapai target. Dengan kata lain pola pangan masyarakat sudah baik namun akses/ketersediaan pangan masih belum optimal.
8. Nilai AKIP Perangkat Daerah meningkat dari tahun ke tahun dengan faktor penyebab yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 yang secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2025-2029	Capaian (%)
Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB *	Persen	19,06	18,86	101,06
	Jumlah Produksi Padi	Ton	127.999,89	156.000,00	82,05
	Jumlah Produksi Cabai Merah	Ton	15.900,38	17.100,00	92,98
	Jumlah Produksi kelapa sawit	Ton	209.600,00	192.500,00	108,88
	Jumlah produksi Kelapa	Ton	49.800,00	55.800,00	89,25

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2025-2029	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka 1-100	69,31	78,80	87,96
	Skor Pola Pangan Harapan	Angka 1-100	87,85	84,00	104,56
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75,77)	A (80,70)	93,89

Ket: *) Sumber Data BPS Kabupaten Batu Bara

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian terendah sebesar 82,05% terhadap target akhir Renstra Tahun 2025-2029 terdapat pada Indikator Produksi Padi. Namun capaian tersebut cukup baik karena Tahun 2025 merupakan tahun awal Renstra. Untuk beberapa indikator yang telah melampaui target akhir Renstra 2025-2029 selanjutnya akan dilakukan perubahan target pada Rencana Kerja setiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi lapangan dan tren dari tahun ke tahun.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.5 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran	Bidang Pelaksana
Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian	3.271.911.804	Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan, Bidang Hortikultura dan Sarana dan Prasarana, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan, Bidang Perkebunan
Jumlah Produksi Padi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian		Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan,

Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran	Bidang Pelaksana
Jumlah Produksi Cabai Merah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	431.197.400	Bidang Hortikultura dan Sarana dan Prasarana
Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	752.965.951	Bidang Perkebunan
Indeks Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	7.616.003	Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan,
Skor Pola Pangan Harapan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	432.354.505	Bidang Hortikultura dan Sarana dan Prasarana
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.020.224.541	Sekretariat

Adapun Indikator Kinerja Jumlah Produksi Jumlah Produksi Kelapa tidak didukung dengan anggaran utama, namun didukung oleh Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan yang berjumlah 121 Orang yang terdiri dari PNS dan PPPK.

3.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dilakukan guna mengetahui seberapa optimal input yaitu biaya diubah menjadi output yaitu kinerja, dengan prinsip meminimalkan pemborosan. Efisiensi diukur melalui rasio capaian kinerja terhadap capaian anggaran, di mana rasio lebih atau sama dengan satu diartikan efisien. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam PDRB	Persen	18,70	19,06	101,93	3.271.911.804,00	3.018.460.924,00	92,25	1,01
	Jumlah Produksi Padi	Ton	140.000,00	127.999,89	101,93				
	Jumlah Produksi Cabai Merah	Ton	16.700,00	15.900,38	95,21	431.197.400,00	430.962.400,00	99,95	0,94
	Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	190.950,00	209.600,00	109,77	752.965.951,00	683.836.610,00	90,82	1,09
Meningkatnya Kualitas Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	78,45	69,31	88,34	7.616.003,00	7.611.500,00	99,94	0,87
	Skor Pola Pangan Harapan	Angka (1-100)	82,00	87,85	107,13	432.354.505,00	421.141.575,00	97,41	1,06
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75,77)	BB (75,77)	100,00	16.020.224.541,00	15.544.926.361,00	97,03	0,99

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 20.916.270.204 yang tertampung pada Perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten Batu Bara. Adapun realisasi anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1 Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%	
			Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.
Meningkatnya Kualitas Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Keluarga Rawan Pangan yang Tertangani	12	kecamatan	7,616,003	12	kecamatan	7,611,500	100	99.94
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1	laporan	7,616,003	1	laporan	7,611,500	100	99.94
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analsis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1	Dokumen	7,616,003	1	Dokumen	7,611,500	100	99.94
Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	75.8	BB	16,020,224,541	75.77	BB	15,544,926,361	100	97.03
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	Laporan	12,880,000	14	Laporan	12,880,000	100	100

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	3,400,000	6	dokumen	3,400,000	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	9,480,000	8	Laporan	9,480,000	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3	Dokumen	14,614,507,580	3	Dokumen	14,172,689,426	100	96.98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	137	Orang	14,460,915,580	137	Orang	14,019,097,426	100	96.94
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Laporan	149,492,000	12	Laporan	149,492,000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	laporan	4,100,000	1	laporan	4,100,000	100	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	1	Laporan	9,500,000	1	Laporan	9,500,000	100	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1	Laporan	9,500,000	1	Laporan	9,500,000	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Laporan	48,000,000	1	Laporan	47,064,000	100	98.05

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	80	paket	48,000,000	80	paket	47,064,000	100	98.05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	4	Laporan	170,201,081	4	Laporan	169,494,009	100	99.58
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan keperluan kantor lainnya	12	Paket	40,451,081	12	Paket	39,800,000	100	98.39
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	4	Paket	16,300,000	4	Paket	16,300,000	100	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1259	Dokumen	19,000,000	1256	Dokumen	18,965,000	99.76	99.82
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130	Laporan	94,450,000	130	Laporan	94,429,009	100	99.98
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	6	Unit	101,200,000	6	Unit	101,025,500	100	99.83
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	67,200,000	1	Unit	67,099,500	100	99.85

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	34,000,000	5	Unit	33,926,000	100	99.78
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	Laporan	787,155,880	3	Laporan	770,500,477	100	97.88
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Laporan	2,600,000	1	Laporan	2,600,000	100	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	146,155,880	12	Laporan	141,033,043	100	96.49
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	638,400,000	12	Laporan	626,867,434	100	98.19
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	99	Unit	276,780,000	99	Unit	261,772,949	100	94.58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	50,000,000	1	Unit	49,914,467	100	99.83

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	74	Unit	161,480,000	74	Unit	148,298,082	100	91.84
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18	Unit	12,300,000	18	Unit	11,010,000	100	89.51
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	Unit	50,000,000	1	Unit	49,550,400	100	99.10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5	Unit	3,000,000	5	Unit	3,000,000	100	100
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas lahan baku terfasilitasi sarana pertanian	766	Ha	1,418,282,609	766	Ha	1,356,384,975	100	95.64
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian	3	Laporan	554,730,704	3	Laporan	504,281,000	100	90.91

	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	Laporan	291,948,704	4	Laporan	289,470,704	100	99.15
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2	Laporan	232,696,000	2	Laporan	184,724,296	100	79.38
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3	ton	30,086,000	3	ton	30,086,000	100	100
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	2	Dokumen	863,551,905	2	Dokumen	852,103,975	100	98.67
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3	Dokumen	432,354,505	3	Dokumen	421,141,575	100	97.41

	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1	VUB	431,197,400	1	VUB	430,962,400	100	99.95
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan baku terfasilitasi prasarana pertanian	615	Ha	2,367,309,951	590	Ha	2,294,208,754	95.93	96.91
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	Dokumen	1,067,309,951	2	Dokumen	997,427,520	100	93.45
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4	Laporan	314,344,000	4	Laporan	313,590,910	100	99.76
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	250	Ha	752,965,951	225	Ha	683,836,610	90.00	90.82
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	10	Unit	1,300,000,000	10	Unit	1,296,781,234	100	99.75
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	unit	750,000,000	5	Unit	748,557,307	100	99.81

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5	Unit	550,000,000	5	Unit	548,223,927	100	99.68
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang Dibina	1192	Kelompok	1,102,837,100	1192	Kelompok	903,807,780	100	81.95
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kelembagaan pertanian	3	Laporan	1,102,837,100	3	Laporan	903,807,780	100	81.95
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	Unit	51,726,500	7	Unit	51,484,000	100	99.53
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	122	Orang	919,480,600	122	Orang	720,693,780	100	78.38
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	14	dokumen	131,630,000	14	dokumen	131,630,000	100	100.00
					20,916,270,204			20,106,939,370		96.13

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mencapai 96,13%. Capaian tersebut terdapat pada Subkegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian sebesar 78,38% , hal ini disebabkan karena subkegiatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian yang alokasinya berlebih dari kebutuhan yang disampaikan, namun pada saat sebelum penyaluran tahap dua dana tersebut telah dilakukan rekonsiliasi kebutuhan sebenarnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan dalam pencapaian target kinerja di tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara akan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang lebih matang
- b. Koordinasi antara perencana dan pelaksana kegiatan dan setiap pihak terkait.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dari sumber dana APBD baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga apa yang tertuang pada Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur kebijakan Pembangunan Pertanian di tahun yang akan datang dan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Batu Bara, 28 Februari 2026

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Batu Bara**



Ir. Susilistiawati Ritonga, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19680228 199303 2 002